



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI  
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2018 - 2019  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
28 JULI - 1 AGUSTUS 2019**

\*

\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*

**JAKARTA 2019**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI**  
**RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2018 - 2019**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**28 JULI - 1 AGUSTUS 2019**

---

---

**A. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018- 2019 di Provinsi Sumatera Selatan ini adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
  - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi tanggal 20 April 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 14 Mei 2019.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 di Provinsi Sumatera Selatan adalah dalam rangka melaksanakan fungsi di bidang pengawasan, yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) fungsi Dewan yaitu fungsi *pegawasan*, *anggaran* dan *legislasi*, yaitu sebagai berikut:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog dan mendapatkan masukan langsung dari Pemerintah Daerah dan instansi lainnya di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, sehubungan dengan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Melihat langsung di lapangan manfaat dari realisasi dan pelaksanaan pembangunan bidang kerja Komisi IV DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menyerap aspirasi daerah dalam rangka meningkatkan program-program pemerintah terkait bidang kerja Komisi IV DPR RI pada tahun anggaran yang akan datang.
4. Memperoleh beberapa alternatif pemecahan permasalahan di Provinsi Sumatera Selatan yang dapat diputuskan/direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat yang menjadi mitra Komisi IV DPR RI.

### C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 di Provinsi Sumatera Selatan antara lain :

No.	No. Anggota	Nama	Fraksi
1.	A-335	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	Ketua KOMISI IV/ F.GERINDRA
2.	A-493	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	F.PAN
3.	A-079	DANIEL JOHAN, S.E.	F.PKB
4.	A-139	SUDIN, S.E.	F.PDI PERJUANGAN
5.	A-177	RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.	F.PDI PERJUANGAN
6.	A-209	Drs. I MADE URIP, M.Si.	F.PDI PERJUANGAN
7.	A-163	ONO SURONO, S.T.	F.PDI PERJUANGAN
8.	A-174	AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.	F.PDI PERJUANGAN
9.	A-200	Ir. MINDO SIANIPAR	F.PDI PERJUANGAN
10.	A-223	DJENDRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.	F.PDI PERJUANGAN
11.	A-275	ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.	F.PG
12.	A-297	A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA	F.PG

No.	No. Anggota	Nama	Fraksi
13.	A-359	Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.	F.GERINDRA
14.	A-391	Dr. Hj. FELICITAS TALLULEMBANG	F.GERINDRA
15.	A-436	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	F.DEMOKRAT
16.	A-438	Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.	F.DEMOKRAT
17.	A-451	Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.	F.DEMOKRAT
18.	A-044	H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.	F.PKB
19.	A-050	H. ACEP ADANNG RUHIAT, M.Si.	F.PKB
20.	A-071	Drs. H. IBNU MULTAZAM	F.PKB
21.	A-105	Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.	F.PKS
22.	A-103	Drs. FADHOLI	F.NASDEM
23.	A-520	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY, S.Sy.	F.PPP
24.	A-540	Hj. KASRIYAH	F.PPP
25.	A-551	Dr. ERISLAN, S.T., M.M.	F.HANURA

#### **D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2019 - 1 Agustus 2019 dan bertempat di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **E. GAMBARAN UMUM LOKASI KUNJUNGAN KERJA**

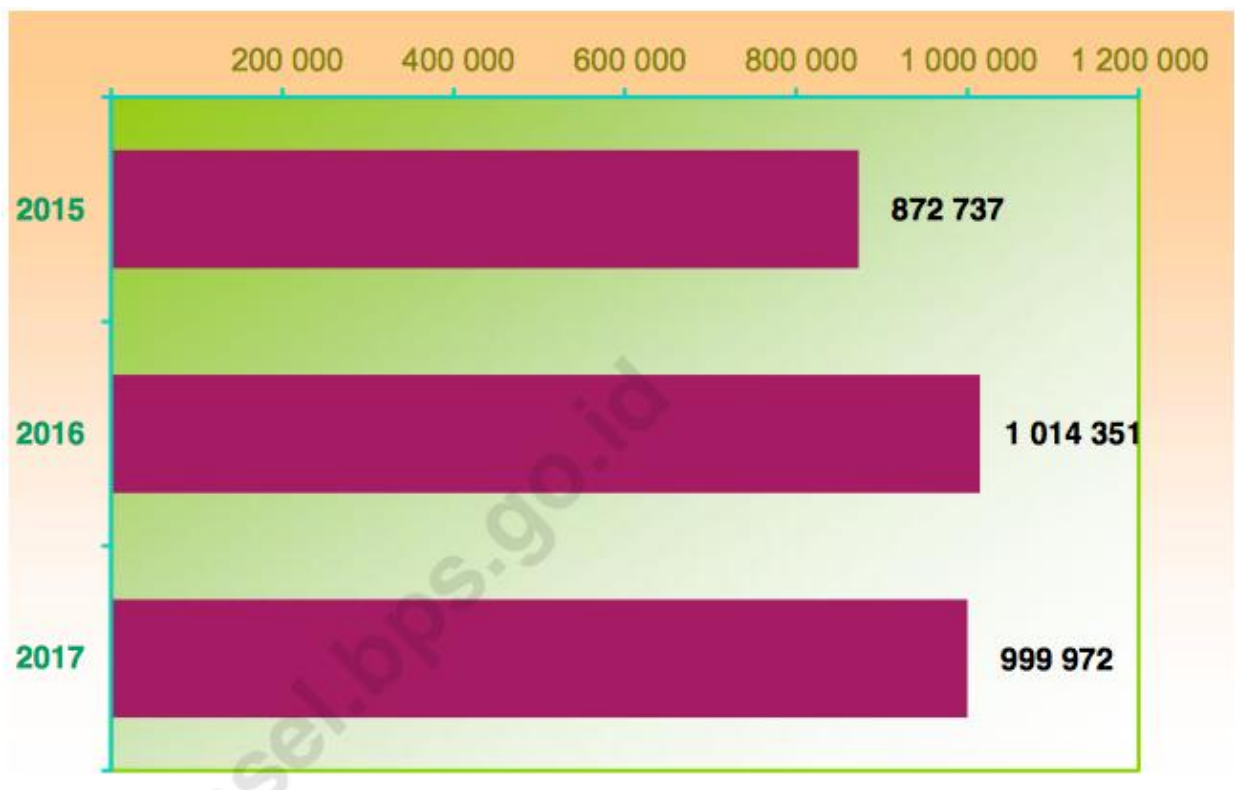
##### **Pertanian Provinsi Sumatera Selatan**

##### **Tanaman Bahan Makanan**

Di tahun 2017, luas panen padi sawah hampir mencapai 954 ribu ha, sedangkan luas panen padi ladang sebesar 46 ribu ha. Jika dibandingkan luas panen padi sawah tahun 2016 sebesar 952 ribu ha, luas panen padi sawah tahun 2017 naik 0,2 persen.

Komoditas jagung, kacang tanah, dan ubi kayu mengalami peningkatan luas panen yang cukup tinggi masing- masing yakni mencapai 58,31 persen atau sebesar 50.916 hektar, 25,94 persen atau 420 hektar, dan 10,15 persen atau 1.279 hektar dibandingkan dengan luas panen di tahun 2016. Sedangkan komoditas kacang kedelai, kacang hijau, dan ubi jalar mengalami penurunan luas panen masing- masing sebesar 55,50 persen atau 8.407 hektar, 17,87 persen atau 151 hektar, dan 23,74 persen atau 296 hektar.

**Luas Panen Padi (Sawah dan Ladang) di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2017 (dalam Hektar)**



### **Hortikultura**

Sumatera Selatan memiliki keragaman produksi tanaman hortikultura seperti sayuran dan buah- buahan. Pada tahun 2017, dari lima komoditi sayur-sayuran, yaitu bawang merah, cabai, kentang, kubis, dan petsai, empat komoditi diantaranya mengalami peningkatan produksi sama halnya untuk komoditi buah-buahan menunjukkan kecenderungan kenaikan produksi.

Pada komoditi sayur-sayuran, bawang merah menunjukkan peningkatan produksi yang sangat tinggi, yakni sebesar 115,78 persen atau 7.382 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada komoditi buah-buahan, mangga, durian, jeruk, Pisang dan Nanas menunjukkan peningkatan produksi pada tahun 2017. Namun, terjadi penurunan produksi pada

komoditi pepaya dimana pepaya mengalami penurunan sebesar 4,06 persen atau 8.204 ton.

### **Perkebunan**

Selama tahun 2017, karet, kelapa sawit, kopi, dan kelapa merupakan komoditas yang memproduksi secara signifikan dibandingkan komoditas perkebunan lainnya. Produksi komoditas ini berturut-turut mencapai 1,26 juta ton, 400.790,09 ton, 249.377,66 ton, dan 66.467,98 ton.

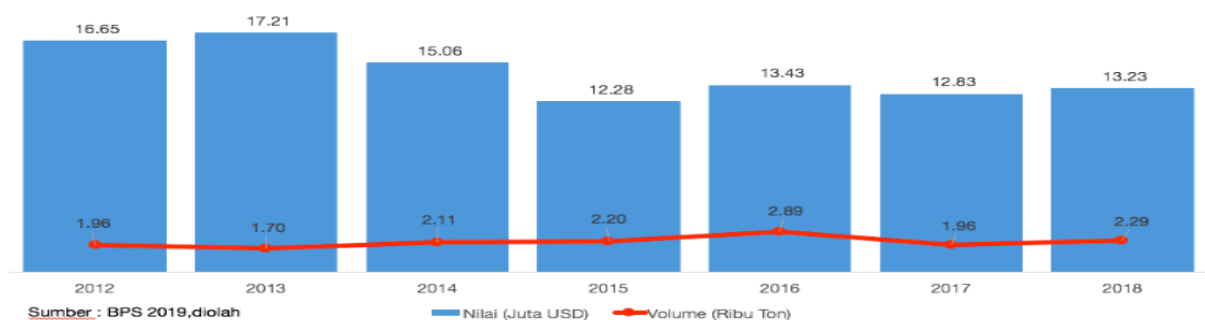
### **Peternakan**

Secara umum, populasi ternak yang didominasi oleh kambing mengalami penurunan sebesar 7,04 persen dengan total populasi mencapai 711.327 ekor di tahun 2017. Sementara untuk populasi unggas yang didominasi oleh ayam pedaging juga mengalami penurunan sebesar 2,49 persen dengan total populasi mencapai 42.444.169 ekor di tahun 2017.

Sama halnya dengan populasi ternak dan unggas, produksi daging ternak dan unggas mengalami penurunan masing-masing sebesar 21,55 persen dan 2,87 persen dibandingkan dengan 2016.

### **Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan**

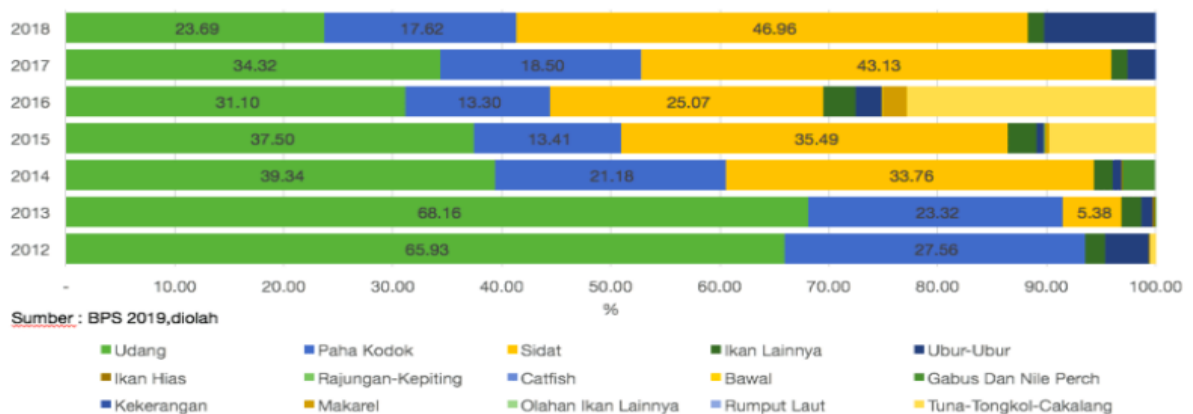
Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi pengeksport produk perikanan di wilayah Pulau Sumatera. Kontribusi nilai ekspor perikanan Sumatera Selatan terhadap total nilai ekspor perikanan Indonesia dalam periode 2012-2018 relatif masih kecil, yaitu rata-rata sebesar 0,34%. Dalam periode 2012-2018 rata-rata volume ekspor perikanan dari Provinsi Sumatera Selatan tumbuh sebesar 5,17% namun secara nilai rata-rata turun sebesar 3,26% pertahun. Volume ekspor perikanan Sumatera Selatan Tahun 2012 mencapai 1,96 ribu ton dan tahun 2018 menjadi 2,29 ribu ton. Sementara nilai ekspor tahun 2012 mencapai 16,65 juta USD, dan Tahun 2018 menjadi 13,23 juta USD. Secara grafis perkembangan ekspor perikanan Sumatera Selatan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Perikanan Sumatera Selatan

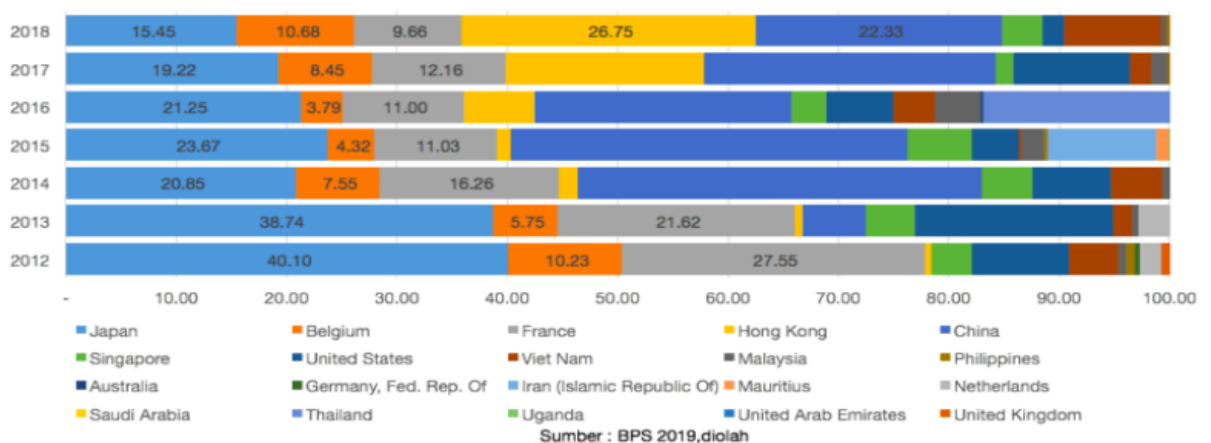
Sumber : BPS 2019

Berdasarkan data BPS (2019) terlihat bahwa dalam periode 2012-2018 terjadi perubahan kontribusi komoditas perikanan yang diekspor dari Sumatera Selatan. Tahun 2012 komoditas terbesar yang diekspor dari Sumatera Selatan adalah udang (65,93%) dan paha kodok (27,56%). Sementara pada tahun 2018 komoditas terbesar adalah Sidat (46,96%), udang (23,69%), dan paha kodok (17,62%). Menurunnya kontribusi udang terlihat sangat berpengaruh kuat terhadap penurunan nilai ekspor perikanan Sumatera Selatan. Secara grafis perkembangan kontribusi volume ekspor perikanan Sumatera Selatan menurut komoditas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Share Volume Ekspor Perikanan Sumatera Selatan Menurut Jenis Komoditas

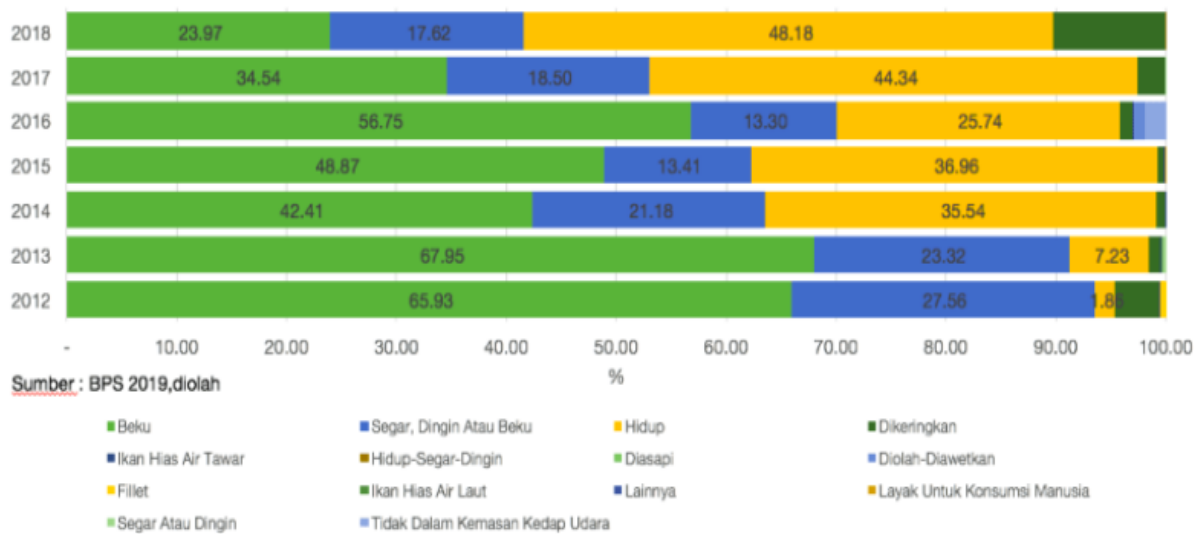
Selain itu juga, tujuan negara ekspor produk perikanan Sumatera Selatan juga mengalami perubahan. Dalam periode 2012-2018 terjadi perubahan negara tujuan ekspor komoditas perikanan yang diekspor dari Sumatera Selatan. tahun 2012 tujuan ekspor terbesar dari Sumatera Selatan adalah Japan (40,10%), Prancis (27,55%), Belgia (10,23%), dan USA (8,79%). Sementara pada tahun 2018 negara tujuan ekspor terbesar adalah China (22,33%), Hongkong (26,75%), Japan (15,45%), Belgia (10,68%) dan Prancis (9,66%). Secara grafis perubahan share volume ekspor perikanan Sumatera Selatan menurut negara tujuan dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Share Volume Ekspor Perikanan Sumatera Selatan Menurut Negara Tujuan

Dalam periode 2012-2018 terjadi perubahan bentuk komoditas perikanan yang diekspor dari Sumatera Selatan. Tahun 2012 komoditas perikanan yang diekspor dari Sumatera Selatan lebih dominan dalam bentuk beku (65,93%) dan Segar 27,56%). Sementara tahun 2018 komoditas perikanan yang diekspor dari Sumatera Selatan lebih dominan dalam bentuk hidup (48,18%), beku (23,97%), dan segar (17,62%).

Tahun 2018 ekspor perikanan Sumatera Selatan dari pelabuhan Sungai Musi dikirim ke negara Jepang (31,15%), Belgia (24,83%), Prancis (22,46%), Vietnam (12,18%), Singapura (4,71%), USA (3,25%), dan hongkong (1,42%). Komoditas ikan dari Bandara Badaruddin dikirim ke Singapura (74,08%) dan Malaysia (25,92%). Komoditas ikan dari Bandara Soekarno Hatta dikirim ke Hongkong (55,03%), China (44,62%), dan Singapura (0,35%). Komoditas ikan dari pelabuhan Tanjung Priok dikirim ke Vietnam (41,84%), Jepang (24,26%), China (16,24%), Filipina (4,03%), Hongkong (3,45%), dan USA (7,08%).



Gambar 5. Share Volume Ekspor Perikanan Sumatera Selatan Menurut Bentuk Produk

Tahun 2018 komoditas *catfish* dari Sumatera Selatan 100% diekspor ke Malaysia. Komoditas ikan hias diekspor ke Singapura (83,11%) dan Malaysia (16,89%), paha kodok diekspor ke Belgia (60,61%), dan Perancis (39,39%). Rajungan-Kepiting 100% diekspor ke Singapura. Sidat diekspor ke Hongkong (55,04%), China (44,64%), dan Singapura (0,32%). Udang diekspor ke Jepang (65,20%), perancis (11,48%), Singapura (9,65%), dan USA (8,43%).

Tahun 2018 komoditas *catfish* dari Sumatera Selatan 100% diekspor dalam bentuk beku. Komoditas ikan hias yang diekspor dari Sumatera Selatan 100% merupakan ikan hias air tawar. Paha kodok diekspor dalam bentuk segar (100%). Sidat diekspor dalam bentuk hidup (100%) dan udang dalam bentuk beku (100%).



## **Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan**

Produksi kayu hutan pada tahun 2016 di Sumatera Selatan yang didominasi oleh kayu bulat mengalami kenaikan sebesar 23,71 persen dengan total produksi 6.128.156,56 m<sup>3</sup>.

Pada 2015, Sumsel dan provinsi lainnya mengalami kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah, menimbulkan bencana asap hingga ke negara tetangga. Mengingat sebagian wilayah di Tanah Air saat ini sudah memasuki musim panas, daerah-daerah yang memiliki lahan gambut harus waspada.

Oleh karena itu, BPBD Sumsel terus mengawasi persebaran titik api-terutama di daerah rawan terbakar-untuk mencegah terjadinya kebakaran. Upaya yang dilakukan, di antaranya sosialisasi pencegahan terutama di daerah-daerah yang rawan terbakar, termasuk wilayah gambut dan mengoptimalkan peranan BPBD Kabupaten dan Kota.

BPBD Sumsel juga mengajak masyarakat peduli terhadap hutan dan lahan di sekitarnya agar tetap lestari. Data menunjukkan, daerah yang rawan terbakar di Palembang di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin.

Kebakaran lahan di Provinsi Sumatera Selatan makin meluas. Sejak awal Juli hingga akhir Juli 2019, keseluruhan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Sumsel mencapai sekitar 60 hektare. Berdasarkan catatan, lahan yang paling tinggi terbakar berada di daerah Ogan Ilir dengan luasan lahan mencapai 72,15 hektare dan kondisi lahan yang terbakar memang kebanyakan lahan mineral. Disusul Kabupaten Penungkal Abad Lematang Ilir (PALI) dengan luasan lahan mencapai 57,75 hektare, Kabupaten Banyuasin seluas enam hektare, serta Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) seluas empat hektare.

## **F. HASIL RAPAT PERTEMUAN DI KANTOR PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

### **1. Paparan dan Diskusi dengan Pemerintah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan**

- a. Provinsi Sumatera Selatan memiliki lahan dengan luas 339.395 ha dimana 522.415 ha atau 70,65% merupakan lahan rawa. Pada Tahun 2019, Sumatera Selatan mendapatkan kegiatan SERASI seluas 200 ribu ha yang tersebar di 9 kabupaten Sumatera Selatan antara lain Kab. Banyuasin, Musi banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Oku Timur, Musirawas Utara, Pali, Ogan Komering Ulu, dan Muara Enim.

- b. Provinsi Sumatera Selatan juga memperoleh program program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Pasar Ikan Modern. Pasar Ikan Modern ini diharapkan dapat menampung berbagai jenis ikan untuk diperdagangkan. Dilaporkan bahwa pembangunan Pasar Ika Modern yang berlokasi di kota Palembang sudah berjalan sekitar 6%-7%.
- c. Terkait dengan perlindungan hutan dan antisipasi kebakaran hutan yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah sudah melakukan aktivasi 1500 personil beserta grup perusahaan perkebunan. Pemerintah Daerah telah menyebarkan dan mensosialisasikan maklumat Gubernur Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan, dan Pangdam 2 Sriwijaya terkait dengan antisipasi kebakaran hutan.
- d. Dengan adanya program Komisi IV di Provinsi Sumatera Selatan, dapat meningkatkan perekonomian Sumatera Selatan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pemerintah Daerah berharap agar Komisi IV DPR RI tetap mendorong Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan sektor pangan dan pertanian, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.
- e. Pelaksanaan program kerbau rawa sudah direncanakan di Provinsi Sumatera Selatan, lokasinya di kabupaten banyuasin dengan rencana luas lahan 27 ha (12 ha hibah provinsi Sumatera Selatan, 15 ha merupakan hibah dari masyarakat sekitar). Ada keterlambatan per 31 Desember 2018 baru berkisar 70-75% diproses dan ditindaklanjuti kembali di Tahun 2019 mencapai 90% per Juni 2019 (kemungkinan akan selesai terealisasi diawal bulan Agustus 2019).
- f. Antisipasi Pemerintah untuk kemarau dan kebakaran hutan, penetapan status siaga bencana asap sudah dilalui sesuai dengan Keputusan Gubernur no 103 Tahun 2019 tentang penentapan status siaga darurat bencana asap akibat Karhutla dan ditindaklanjuti dengan membentuk posko satuan tugas diketuai oleh Danrem dan Kepala BPPD Provinsi Sumatera Selatan.
- g. Terhadap infastruktur sarana dalam pelaksanaan Karhutla, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan bantuan 4 helikopter.
- h. Terkait dengan penanganan program SERASI. Provinsi Sumatera Selatan masih mengharapakan bantuan untuk setiap daerah berupa perbaikan infrastruktur dan bantuan Saprodi.
- i. Dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan: **Kementan**, yang paling penting program SERASI, pemberian pupuk untuk mengurangi kadar asam dari rawa segera diturunkan, minimal bulan ini (bulan 9, di Sumatera Selatan sudah

mulai musim tanam). **KKP**, terkait dengan pulomas pari sudah mendapatkan bantuan tetapi anggarannya sedikit, diharapkan bantuannya merata karena Provinsi Sumatera Selatan memiliki target untuk dapat memproduksi bibit ikan sendiri. **Kehutanan**, yang paling penting adalah penanggulangan dan diharapkan solusi untuk masyarakat yang dapat dilakukan apabila masyarakat dilarang untuk melakukan pembakaran hutan. Pemerintah Daerah meminta dukungan alat minimal 1 setiap kecamatan di Provinsi Sumatera Selatan. **PT Pusri**, kebutuhan dolomit Sumatera Selatan sangat kurang, sehingga meminta dukungan untuk pengembangan dolomit (untuk lahan rawa). **Bulog**, DPRD selalu menemukan tumpukan beras-beras yang busuk, alasannya sirkulasi gudang 6000 ton yang tidak tersalurkan dan busuk. Diharapkan distribusi masuk dan keluar beras harus jelas. Jika infrastruktur Perum Bulog yang bermasalah, diharapkan dukungan Komisi IV untuk memberikan dukungan anggaran kepada Perum Bulog.

## 2. Paparan dan Diskusi dengan Kementerian Pertanian

- Tujuan diadakannya program SERASI adalah untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan/atau meningkatkan produktivitas serta meningkatkan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan rawa. Sedangkan sasaran kegiatan optimasi lahan rawa di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki persawahan yang dapat dioptimalkan di lahan rawa, dengan total alokasi seluas 500.000 ha.
- Jenis kegiatan SERASI adalah: *Survey* investigasi dan *design* (SID) sederhana, penataan lahan dan sistem tata air, bantuan alsintan, bantuan SAPRODI (benih, pupuk, dolomit, herbisida), integrasi budidaya (hortikultura, ternak, ikan), pengembangan usaha melalui kelompok usaha bersama (KUB), melibatkan petani millennial (panen, olah tanah, tanam, pengelolaan UPJA, distribusi hasil, dll)
- Prinsip desain tata kelola air di lahan rawa adalah dapat mengatasi kekurangan air segar (air baku pertanian) pada saat musim kemarau, mampu membuang kelebihan air pada saat musim hujan, mampu memproteksi lahan dari genangan banjir pada saat musim hujan, serta secara operasional bisa melakukan sirkulasi untuk mengatasi masalah kualitas air.
- Program SERASI yang dijalankan di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah telah mengalokasikan kegiatan optimasi lahan rawa Tahun Anggaran 2019 dengan total luas lahan 200 ribu ha atau senilai 870 Miliar, diantaranya:

Banyuasin 82.559 ha; Muba 35.143 ha; Oki 67.948 ha; ogan ilir 1.200 ha; oku timur 4.000 ha; muratara 1.000 ha; pali 5.850 ha; oku 300 ha; muara enim 2.000 ha.

- Tanggapan Kementerian Pertanian: Terkait SERASI. Pemerintah dalam pengerjaan program SERASI lebih fokus menuntaskan satu wilayah terlebih dulu (tahap awal adalah Kab Banyuasin) karena biaya exavator sangat tinggi.
- Bantuan yang diberikan kepada petani langsung diberikan tanpa melalui perantara kecuali pengerjaan exavator dibantu oleh Dinas Pertanian setempat.
- Pengerjaan program SERASI baru dilakukan di Kab Banyuasin, Muba, dan Oki, sisanya sudah dilakukan *plotting* CPCL
- Terkait dengan perbaikan saluran sekunder karena mengalami pendangkalan. Saluran irigasi sekunder saat ini berada dikewenangan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian sudah melakukan koordinasi.
- Pelaksanaan pola SID bersamaan namun konstruksinya dilakukan setelah SID telah diselesaikan.
- Terkait dengan anggaran, Rp4,3 juta merupakan anggaran maksimum, sisanya merupakan anggaran swadaya dan tidak boleh ada anggaran yang mengendap di petani penerima bantuan. Nominal Rp4,3 juta sesuai dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya: Rehab Jaringan Irigasi, perbaikan gorong-gorong, pompanisasi, dll

### **3. Paparan dan Diskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan**

- Pasar Ikan Modern telah diresmikan oleh Presiden Jokowi bulan Maret 2019 di Muara Baru, menyusul Pasar Ikan Modern di Soreang Bandung dan Pasar Ikan Modern di kota Palembang.
- Pasar Ikan Modern di Muara Baru mendapatkan bantuan teknis dari Pemerintah Jepang, mulai dari lokasinya, *design*, tata ruang, dsb disesuaikan berdasarkan pengalaman Pemerintah Jepang.
- Pasar Ikan Modern di Sorean juga sudah dibangun dan mendapatkan bantuan APBD dari Pemerintah Daerah.

- Pasar Ikan Modern untuk kota Palembang, lahan untuk pembuatan Pasar Ikan Modern didapatkan dari Pemerintah Daerah. Akses menjangkau Pasar Ikan Modern berada di tengah kota dekat dengan Hotel Novotel. Didalam kompleks sudah selesai dilakukan pemindahan dan penentuan peletakan perlengkapan di dalam pasar Ikan Modern
- Anggaran untuk Pasar Ikan Modern sebesar 23,94 M yang terdiri dari perencanaan dan pengawasan. Direncanakan seluruh ikan di Pulau Sumatera akan masuk ke Pasar Ikan Modern, baik ikan hidup maupun ikan beku

#### 4. Paparan dan Diskusi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Pada periode Januari-Juli 2019, terjadi penurunan hotspot kebakaran hutan dibandingkan tahun 2015 (kondisi bencana karhutla besar) dan Tahun 2018. Sedangkan luasan indikatif karhutla terjadi peningkatan menjadi 236 di Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 25 (berdasarkan citra satelit LANDSAT)
- Pada periode Januari-Juli Tahun 2018 terdeteksi hotspot sebanyak 35 titik sedangkan tahun 2019 di periode yang sama turun menjadi 23 titik
- Upaya yang saat ini dilakukan oleh KLHK adalah pemadaman darat dan udara, sosialisasi dan kampanye untuk penyadartahuan pencegahan karhutla, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, penguatan keteknikan pencegahan karhutla, patroli rutin dan patroli terpadu pengendalian karhutla, penyampaian informasi peringatan dini dan deteksi dini (data hotspot) melalui web *sipongi.menlhk.go.id*, dukungan pemerintah pusat melalui DBH DR, pengurangan resiko karhutla melalui pemanfaatan bahan bakaran (*fuel management*), pembentukan dan pembinaan MPA, *community involvement*, pelatihan dan pembentukan brigade dalkarhutla di tingkat tapak (KPHP, KPHL, KPHK) dan pemegang konsesi, penguatan sarana dan prasarana pengendalian karhutla, penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan, perbanyak aksi pencegahan di tingkat tapak dengan sinergi semua pihak.
- Di Provinsi Sumatera Selatan, KLHK telah melakukan patroli terpadu dan sudah dilaksanakan di 50 posko dan 150 jangkauan di bulan Mei-Juli 2019 dan patroli akan bertahap dilaksanakan sampai dengan akhir Oktober 2019
- Patroli untuk karhutla diperkuat dengan patroli mandiri dan patroli rutin oleh Manggala Agni, Brigdalkarhut Taman Nasional/Balai KSDA/KPH

- Patroli bersinergi dengan Operasi SATGAS Gabungan di 6 Provinsi di desa rawan kebakaran
- Potensi penggunaan anggaran pengendalian kebakaran hutan dan lahan
  - ✓ Menteri LHK mendorong agar DBH DR dapat dimanfaatkan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan di tingkat Provinsi dan Kabupaten
  - ✓ Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.112/MENLHK/PPI.4/3/2018 Tanggal 5 Maret 2018 perihal daerah potensi tinggi Karhutla dalam rangka penggunaan dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi (DBH-DR) Tahun 2018 adalah: Daerah yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan meliputi: Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Sumsel, Jambi, Sumbar, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Papua, NTB, Sulsel, Sulut, Sultra, dan Sulbar.
  - ✓ Surat Menteri LHK Nomor S. 214/MENLHK/PPI/REN.0/4/2019 tanggal 11 April 2019 perihal Provinsi dengan potensi kerawanan karhutla tinggi tahun 2019, menegaskan kembali agar provinsi rawan dapat menyiapkan anggaran melalui pemanfaatan DBH DR
  - ✓ KLHK mendorong penggunaan Dana Desa untuk mendukung operasional dalkarhutla dan penanggulangan bencana tingkat desa dengan koordinasi KEMENDAGRI dan KEMENDES
- Pelibatan masyarakat dalam dalkarhutla melalui pembentukan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
- 1 kelompok MPA berjumlah 30 personil (2 regu) yang telah mengikuti pelatihan pemadaman dasar
- MPA binaan KLHK sejumlah 960 orang/ 64 regu, binaan perusahaan: 202 orang
- Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan kampanye dan sosialisasi diantaranya: 1) sosialisasi di tingkat sekolah dan desa, fatwa MUI terkait pembakaran hutan dan lahan, publikasi pada media massa, 2) kampanye dengan menggunakan *talkshow*, televisi dan radio, media sosial.
- KLHK bekerjasama dengan Kementerian Kominfo melaksanakan SMS BLAST peringatan dini dan himbauan kepada masyarakat dilaksanakan di setiap daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot.

- Posko siaga satgas darurat karhutla Sumatera Selatan: balai pengendalian perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan berperan aktif dalam posko Siaga Satgas Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Sumut. Kegiatan yang diikuti selama bergabung dengan posko antara lain: Rapat Koordinasi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan, Rapat Evaluasi Posko.
- Dukungan BRG- Sumur Bor dan Sekat Kanal di Sumatera Selatan: 1) Banyuasin mendapatkan dukungan Sumur Bor 55 Daops dan sekat kanal 2254 Daops; 2) OKI mendapatkan dukungan Sumur Bor 6241 Daops dan sekat kanal 1877 Daops; 3) Muba mendapatkan dukungan sumur bor 881 Daops, Sekat Kanal 2666 Daops.
- Upaya pencegahan melalui penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB)
  - ✓ KLHK terus melaksanakan upaya sosialisasi alternatif PLTB melalui pemanfaatan sisa pembersihan lahan untuk cuka kayu, kompos, dan briket arang
  - ✓ Kerjasama dengan PT pupuk Kaltim untuk membuat plot-plot contoh demonstrasi keberhasilan cuka kayu dilaksanakan di Kalimantan Barat
  - ✓ Di setiap Daops Manggala Agni juga dibuat plot contoh PLTB sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat dalam menyiapkan lahan dengan ramah lingkungan
- Upaya tindak lanjut
  - ✓ Optimalisasi peran Satgas penanganan kebakaran hutan dan lahan yang sudah terbentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
  - ✓ peningkatan peran KPH, perusahaan pemegang ijin bidang perkebunan, kehutanan, dan tambang dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan kewajiban dalam aturan perundangan (sumber daya manusia, sarana prasarana, kegiatan, anggaran dan dukungan pemberdayaan masyarakat)
  - ✓ optimalisasi penggunaan pendanaan DBH DR dan peluang dana desa untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan terutama pemenuhan sarana prasarana dan operasional kegiatan pencegahan dan pemadaman
  - ✓ optimalisasi peran desa dan peningkatan pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan
  - ✓ dukungan operasi udara (patroli udara untuk deteksi langsung karhutla, pembuatan hujan buatan dan *water bombing*) pada kondisi siaga darurat untuk pemadaman pada remote area

- ✓ melanjutkan proses penegakan hukum kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan, baik kasus lama yang belum tuntas maupun kasus baru;
  - ✓ peningkatan upaya kampanye dan sosialisasi penyadartahuan
  - ✓ peningkatan sinergi dalam mencari solusi lahan tanpa membakar di masyarakat
- Mulai bulan Juli akan memasuki musim kemarau yang akan panjang dan kemungkinan menuju el nino moderate seperti Tahun 2015.
  - KLHK sudah merubah paradigma yang awalnya melakukan pemadaman, Pemerintah saat ini fokus dalam pencegahan sebelum terjadinya api. Secara fisik KLHK sudah siap untuk menghadapi kebakaran hutan.

## 5. Paparan dan Diskusi dengan Perum Bulog

- Realisasi pengadaan divisi regional Sumatera Selatan

Satuan Ton setara beras

No	DIVRE/SUBDIVRE	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI*
1	DIVRE SUMSEL	52.313	7.626	32.095	31.653
2	KANLOG MURA	15.873	418	2.399	1.036
3	SUBDIVRE LAHAT	7.694	379	5.650	148
4	SUBDIVRE BANGKA	4.000	10	241	171
5	KANLOG BELITUNG	80	-	32	-
6	SUBDIVRE OKU	40	7.175	30.157	9.198
Total		80.000	15.608	70.570	42.206

\*) Update Data Per Tanggal 26 Juli 2019 (Pagi)

- Penyaluran Bansos Rastra divisi regional Sumatera Selatan

No	Divre / Subdivre Kabupaten / Kota	REALISASI DO BANSOS RASTRA – DASAR ALOKASI						JUMLAH TOTAL			
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	SPP (KG)	DO (Kg)	%
	Propinsi Sumsel	3.415.440	3.415.440	3.415.440	3.415.440	3.415.440	1.516.600	1.123.820	20.110.400	19.717.620	98,05%
I	Divre Sumsel	1.696.400	1.696.400	1.696.400	1.696.400	1.696.400	1.393.420	1.000.640	11.268.840	10.876.060	96,51%
II	Sub Divre Lahat	824.300	824.300	824.300	824.300	824.300	-	-	4.121.500	4.121.500	100,00%
III	Sub Divre Oku	530.860	530.860	530.860	530.860	530.860	-	-	2.654.300	2.654.300	100,00%
IV	Kanlog Mura	363.880	363.880	363.880	363.880	363.880	123.180	123.180	2.065.760	2.065.760	100,00%
	Provinsi Babel	187.890	187.890	187.710	187.710	187.710	-	-	938.910	938.910	100,00%
V	Sub Divre Bangka	146.680	146.680	146.510	146.510	146.510	-	-	732.890	732.890	100,00%
VI	Kanlog Belitung	41.210	41.210	41.200	41.200	41.200	-	-	206.020	206.020	100,00%
	Jumlah Total	3.603.330	3.603.330	3.603.150	3.603.150	3.603.150	1.516.600	1.123.820	21.049.310	20.656.530	98,13%

Data tanggal 1 Januari s.d 26 Juli 2019 (Pagi)



- Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Sumatera Selatan 2019
  - ✓ Realisasi ketersediaan pasokan & stabilisasi harga (KPSH) beras medium CBP Tahun 2019

NO	SUB DIVRE	BULAN							JUMLAH
		JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	
1	DIVRE SUMSEL	68,005.00	60,470.00	35,715.00	72,915.00	61,920.00	00.00	673,975.00	973,000.00
2	KANLOG MURA	300,500.00	237,165.00	32,035.00	14,290.00	6,010.00	00.00	4,000.00	594,000.00
3	SUBDIVRE LAHAT	9,400.00	12,000.00	9,000.00	22,264.00	8,450.00	2,000.00	7,300.00	70,414.00
4	SUBDIVRE BANGKA	43,500.00	42,200.00	42,000.00	123,400.00	56,000.00	46,000.00	130,000.00	483,100.00
5	KANLOG BELITUNG	62,050.00	68,600.00	39,870.00	70,500.00	53,030.00	23,000.00	59,100.00	376,150.00
6	SUBDIVRE OKU	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	6,000.00	37,500.00	43,500.00
<b>JUMLAH</b>		<b>483,455.00</b>	<b>420,435.00</b>	<b>158,620.00</b>	<b>303,369.00</b>	<b>185,410.00</b>	<b>77,000.00</b>	<b>911,875.00</b>	<b>2,540,164.00</b>

- ✓ Realisasi penyaluran CBP bencana alam Tahun 2019

NO	SUB DIVRE	BULAN							JUMLAH
		JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	
1	KANLOG MURA	00.00	00.00	53,470.40	00.00	00.00	00.00	00.00	53,470.40
2	SUBDIVRE OKU	00.00	15,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	15,000.00
<b>JUMLAH</b>		<b>00.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>53,470.40</b>	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>	<b>68,470.40</b>

Data tanggal 26 Juli 2019 (Pagi)

- Posisi persediaan beras 2019 divisi regional Sumatera Selatan

Data per tanggal 25 Juli 2019 (Closing)

Satuan : ton

NO	UNIT KERJA	BERAS CBP	BERAS KOMERSIAL	TOTAL
1	Divre Sumsel & Babel	36.549	238	36.787
2	Kanlog Mura	1.733	5	1.738
3	Subdivre Lahat	1.041	-	1.041
4	Subdivre Bangka	1.423	499	1.922
5	Kanlog Belitung	293	626	919
6	Subdivre OKU	13.552	-	13.552
<b>JUMLAH</b>		<b>54.591</b>	<b>1.368</b>	<b>55.959</b>

- Terkait dengan penambahan UPGB, Bulog masih memperbaiki UPGB di Pelang dan mengkaji tambahan lokasi menyesuaikan tempat penggilingan padi milik masyarakat. Penggilingan yang dibuat oleh Perum Bulog adalah penggilingan yang *rice to rice* yang tidak membutuhkan lokasi yang besar
- Perum Bulog berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi yang menggunakan beras Bulog untuk ASN dan diharapkan dukungan agar beras BPNT menggunakan beras Bulog

## 6. Paparan dan Diskusi dengan Badan Restorasi Gambut

- Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kekeringan atau tinggi muka air gambut telah dipasang sudah disebar ke Kabupaten Muba dan Oki umumnya sudah dibawah 1 cm. Di Oki alat ukur sudah menunjukkan angka 93 cm dibawah permukaan tanah yang menandakan lahan gambut sudah sangat kering. BRG setiap minggu selalu melakukan update data ke Pemerintah Daerah dll. Untuk daerah lain alat ukur tinggi muka air gambut rata-rata menunjukkan 30-40 cm.
- Diharapkan konsentrasi Kapolri untuk lebih efektif ke Lahan Kering
- Di Tahun 2019, Kementerian Keuangan menyetujui agar anggaran BRG dialokasikan untuk membantu pemadaman dengan membuat sumur bor (dan pemeliharaan). Pengalokasian anggaran untuk sumur bor tidak bisa serentak seluruh kabupaten karena setiap tahun berubah lokasinya.

## 7. Paparan dan Diskusi dengan PT Pupuk Indonesia

- PT Pupuk Indonesia siap mendukung Program SERASI
- PT Pupuk Indonesia memiliki produk baru yaitu *bioripat* (pupuk hayati yang mengandung bakteri dan cocok untuk lahan rawa). Pupuk ini dapat menaikkan panen sekitar 1 ton/ha dengan dosis 5-6 liter per ha.

## 8. Paparan dan Diskusi dengan PT Pertani

- Dalam program SERASI, PT Pertani siap mendukung benih Program SERASI

## 9. Paparan DPR RI

- Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menuntaskan seluruh program yang telah direncanakan dan dianggarkan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait dengan program kebo rawa
- Komisi IV DPR RI mendukung agar program kebo rawa agar dikembangkan oleh Pemerintah Pusat
- Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan mobilisasi pengamanan udara dan kehutanan dalam mengantisipasi kebakaran hutan yang sering terjadi di Sumatera Selatan

- Komisi IV DPR RI meminta kepada BRG untuk mendukung antisipasi kebakaran hutan yang sering terjadi di musim kemarau, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan
- Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah Daerah untuk memperkuat koordinasi diantara 3 Kementerian diantaranya: Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (terkait dengan BUMDES dan saluran irigasi)
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan koordinasi lebih konkrit kepada Balai Dinas setempat untuk merealisasikan program SERASI
- Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah memberikan penghargaan kepada manggala api dengan mempermudah pengangkatannya menjadi PNS
- Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera memperingati Pengusaha dengan mencabut ijin tanam jika tidak mengikuti program pemadaman api.
- Komisi IV DPR RI meminta BRG untuk mengajukan segera program penanaman yang telah dilakukan demplot di lahan Gambut secara Nasional
- Komisi IV DPR RI mendukung BRG agar tahun mendatang bisa mandiri dalam membangun dan menjaga lahan gambut Nasional.

## **G. KESIMPULAN**

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk segera menuntaskan seluruh program yang telah direncanakan dan dianggarkan di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya terkait dengan program kebo rawa
2. Komisi IV DPR RI terus mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan mobilisasi pengamanan udara dan kehutanan dalam mengantisipasi kebakaran hutan yang sering terjadi di Sumatera Selatan
3. Komisi IV DPR RI meminta BRG untuk mengajukan segera program penanaman yang telah dilakukan demplot di lahan Gambut secara Nasional
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah memberikan penghargaan kepada manggala api dengan mempermudah pengangkatannya menjadi PNS

## **H. PENUTUP**

Demikian Hasil melaksanakan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2018 - 2019 di Provinsi Sumatera Selatan. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan dan aspirasi yang telah disampaikan, dalam Rapat-rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum BULOG, BRG, PT Pupuk Indonesia, maupun PT Pertani.

Semoga kunjungan ini membawa manfaat bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

**Jakarta, 6 Agustus 2019**

**KETUA KOMISI IV DPR RI**

**Ttd.**

**EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.**

**A-335**

## LAMPIRAN

### **Terima Kunker Komisi IV, Gubernur Titip Peningkatan Anggaran Sektor Pertanian-Perikanan**

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Mewakili Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H. Herman Deru, Sekda Provinsi Sumsel H.Nasrun Umar menerima kunjungan kerja (Kunker) pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (29/7).

Kunker pada masa reses persidangan V tahun sidang 2018-2019 tersebut digelar dalam rangka diskusi dan tanya jawab terkait budidaya padi rawa program Serasi, rencana pembangunan pasar ikan modern di Kota Palembang sertaantisipasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumsel.

Hadir dalam diskusi tersebut di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo, MM, MBA anggota Komisi IV di antaranya Drs. I Made Urip, Ir Mindo Sianipar dari PDIP, Ono Suro ST dari PDIP, dr Hj Felicitas Tallulembang dari Partai Gerindra, Agustina Wilujeng Pramestuti, Drs H Guntur Sasono MSi dan beberapa anggota lainnya. Kemudian Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Profil Ir Mulyadi Hendiawan MM, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Dr.Ir Ruandha Agung Sugardinan M.Sc, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sandra Desi, dan sejumlah pejabat tinggi pusat lainnya.

Sekda Nasrun Umar saat membuka diskusi mengatakan Pemprov Sumsel sangat berterima kasih atas kunjungan Komisi IV ke Sumsel termasuk dukungan komisi itu terhadap sejumlah program di Sumsel terutama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan.

" Dengan adanya program-program tersebut di Sumsel seperti pertanian ditargetkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan petani dan masyarakat. Karena itu kami sangat berharap bapak-ibu tetap mau memperjuangkan anggaran di sektor pertanian kehutanan di Sumsel," jelasnya.

Dalam kesempatan itu Nasrun juga itu memaparkan bahwa Sumsel memiliki sekitar 739 ribu hektar lahan, dimana 522 ribu hektare atau sekitar 70 persennya merupakan lahan rawa. Sumsel juga pada tahun 2019 mendapatkan kegiatan, Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani (Serasi) sebanyak 200 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten di Sumsel.

"Program itu tersebar di sembilan kabupaten yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten OKI, Kabupaten OI, Kabupaten OKUT, Kabupaten Muratara, PALI, OKU dan Muaraenim," jelasnya.

Selain lahan untuk sawah rawa, Sumsel lanjut Nasrun juga mendapatkan kegiatan lainnya seperti program pembangunan pasar ikan modern dari Dirjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pasar seluas 9000 meter persegi ini akan dimanfaatkan untuk menampung berbagai jenis ikan untuk diperdagangkan.

"Pasar ini berlokasi di Simpang Patal dan sudah progres sekitar 6-7 persen," jelasnya. Mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Nasrun Umar juga memaparkan bahwa jumlah hotspot terus mengalami penurunan di Sumsel. Pemprov pun telah mengaktifkan 1.500 personel dari TNI, Polri, Pol PP beserta grup pemadam kebakaran dari beberapa perusahaan.

"Kami juga terus mensosialisasikan penanggulangan karhutla dan menyebarkan maklumat Gubernur bersama Kapolda dan Pangdam II Sriwijaya," jelasnya.

Dengan adanya program-program itu di Sumsel baik di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Perum Bulog diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Sumsel serta meningkatkan kesejahteraan petani. Karena itu pula Sekda mewakili Gubernur berharap pimpinan dan anggota Komisi IV tetap memperjuangkan anggaran pembangunan di sektor pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Perum Bulog di Sumsel.

Di tempat yang sama Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan sepanjang lima tahun terakhir Provinsi Sumsel merupakan daerah paling sering yang mereka kunjungi.

" Kami terus memperjuangkan program-program di Sumsel. Proentasinya mungkin terbesar di Indonesia karena dulu sebelum sebelum kami di komisi ini, anggaran hanya Rp88 miliar sekarang mendekati Rp1,4 triliun. Kami juga menghormati upaya dan kerja keras Sumsel yang berhasil meningkatkan gabah lebih dari 200 persen. Belum lagi Perhutanan dan Perikanan," ujarnya membuka diskusi.

Melalui kunker Ia berharap bisa melihat langsung progres kegiatan di sektor pertanian yang telah mereka usung.

" Kunker kita ini untuk melihat sejauh mana program itu berjalan dan dimana kendalanya. Kalau kendala dan deadlock kita diskusikan dan carikan solusinya.

Sehingga di 2020 bisa kita dorong mana saja yang masih kurang dan terhambat," ujarnya.

Edhy berharap terobosan pengelolaan Sawah Rawa Sumsel mendapat perhatian khusus agar me jadi pionir bagi daerah lain. " Saya berharap Sumsel terus mengembangkan rawa ini karena sejak saya kecil lahan ini tidak dioptimalkan. Sekarang kalau kita lihat lahan ini mulai ditanami padi termasuk di arah Palembang-Muaraenim.

" Kalau ini kita dorong dengan anggaran yang kita miliki, dana itu akan kembali lagi dalam belasan tahun ke depan," ucapnya yakin.

Sumber: <https://palembang.tribunnews.com/2019/07/29/terima-kunker-komisi-iv-gubernur-titip-peningkatan-anggaran-sektor-pertanian-perikanan?page=2>.